

Peningkatan Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK

Firdha Maghfira and Ludovicus Sensi Wondabio

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Dr. Sumitro Djohadikusumo Depok 16424, Indonesia

Article info

Keywords:
ICoFR Design Improvements,
Process Level Controls, and Public
Sector

Kata Kunci:
Pengendalian Tingkat Proses,
Peningkatan Rancangan PIPK, dan
Sektor Publik

ISSN (print): 2598-7763
ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:
Name: Firdha Maghfira
Tel./Fax. No. -
E-mail:
firdhamaghfira.ui@gmail.com

Abstract

This study aims to improve the design of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the Corruption Eradication Commission (CEC)'s booty management process based on policies and best practices from various references related to Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the public sector in Indonesia. The improvements of the ICoFR design was carried out through a qualitative research approach in the form of a single case study, using primary data obtained from direct interviews and secondary data in the form of documentation instruments. The research data was then carried out by qualitative descriptive analysis and content analysis, and the validity of the data was tested using data source and method triangulation. The results of this study are in the form of initial drafts of ICoFR designs, initial drafts of formal guidelines for ICoFR implementations, and initial drafts of policies to encourage ICoFR improvements in the CEC's booty management process.

Citation: Maghfira, F., dan Wondabio, L.S. (2023). Peningkatan Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK. AFRE Accounting and Financial Review, 6(3): 337-350

Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk proses pengelolaan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan kebijakan dan best practice dari berbagai referensi terkait Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) untuk sektor publik di Indonesia. Peningkatan rancangan PIPK dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus tunggal, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung serta data sekunder berupa instrumen dokumentasi. Data penelitian kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif, analisis konten serta dilakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini yaitu berupa rancangan PIPK, rancangan pedoman formal untuk pelaksanaan PIPK, serta rancangan awal kebijakan untuk mendorong perbaikan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK.

JEL Classification: H83, M41
DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v6i3.10285>

1. Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah yang relevan dan andal dapat mewujudkan pelaksanaan APBN yang transparan dan akuntabel. Namun, Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dasar pemberian opini WDP tersebut

berkaitan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada proses pengelolaan barang rampasan KPK. Barang rampasan KPK yaitu barang yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara terkait dengan tindak pidana korupsi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Temuan BPK atas akun barang rampasan tentu menjadi konsentrasi utama KPK, mengingat

barang rampasan KPK termasuk *significant account* pada laporan keuangan KPK dengan porsi sebesar 21,38% atas total nilai aset KPK per 31 Desember 2022. Temuan berulang BPK pada laporan keuangan pemerintah mencerminkan masih adanya kelemahan pada pengendalian intern (Hanif & Sunitiyoso, 2021). Sehingga untuk mencegah temuan berulang pada akun barang rampasan, KPK perlu mengoptimalkan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) pada pengelolaan barang rampasannya. ICoFR terbukti dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Bimo *et al.*, 2019; Fitriana & Hoesada, 2019; Hidayah, 2019; Sunday Ajao & Olayemi Oluwadamilola, 2020; dan Asyari *et al.*, 2021). Efektivitas pengendalian intern juga termasuk salah satu penyebab utama lemahnya kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja pemerintah (Indriasih, 2014; Kasim, 2015). Dengan kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang baik, maka pemerintah mampu mencegah *fraud* dan memperbaiki tata kelola (Afiah & Azwari, 2015; Armelia & Wahyuni, 2020; Yasmin *et al.*, 2021). Dalam mengoptimalkan ICoFR di sektor publik, KPK mengacu pada pedoman Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2017, yang diganti pada tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Republik Indonesia, 2019).

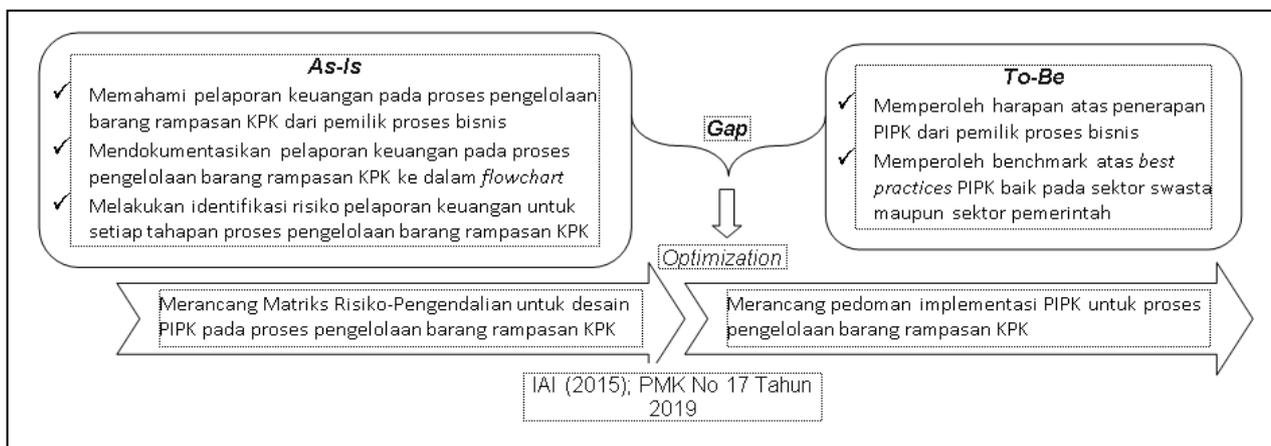
Penelitian Farradhi & Hartanti (2023) menunjukkan dua proses bisnis dengan evaluasi ICoFR dalam kategori kelemahan material dan satu dalam kategori kekurangan pengendalian. Penelitian Adrianto & Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan persediaan belum efektif yang diakibatkan oleh adanya beberapa risiko pada pengendalian yang dapat berpotensi menyebabkan salah saji material

dalam laporan keuangan. Hal ini juga ditemukan pada penelitian Muhamad & Wahyuni (2018) yang menunjukkan desain pengendalian dalam pencatatan piutang pajak belum sepenuhnya efektif dikarenakan adanya beberapa risiko pada pengendalian yang dapat berpotensi menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Namun, efektivitas desain ICoFR lebih tergantung pada penegakan pelaksanaannya dibandingkan hanya mengadopsi desain ICoFR yang ketat (Oh *et al.*, 2014). Belum ditemukan penelitian sebelumnya terkait peningkatan rancangan PIPK setelah berlakunya PMK Pedoman PIPK Tahun 2019, khususnya terkait proses bisnis barang rampasan negara.

Meskipun praktik PIPK di lingkungan KPK telah dilakukan sejak tahun 2019, namun diperlukan perubahan yang cukup kompleks pada desain dan implementasi PIPK pengelolaan barang rampasan KPK untuk mencapai titik yang optimal. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil asesmen awal atas data dan informasi berupa Kertas Kerja PIPK atas Barang Rampasan KPK yang dihimpun pada awal penelitian, mengarah pada dugaan bahwa dalam praktiknya PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK masih belum sesuai dengan konsep ideal. Kondisi ini memberikan motivasi pada penelitian untuk meningkatkan rancangan PIPK secara komprehensif pada entitas pemerintah, khususnya pada proses pengelolaan barang rampasan KPK.

2. Pengembangan Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kesenjangan (*gap analysis*) untuk mengetahui peningkatan rancangan PIPK yang diperlukan pada proses bisnis sehingga dapat memperbaiki PIPK dari kon-



Gambar 1. Kerangka Penelitian

disinya saat ini (*As-Is*) menjadi PIPK yang diharapkan (*To-Be*). *Gap analysis* terdiri dari masa depan ("*what should be*"), dan kemudian (3) menyoroti kesenjangan yang ada dan perlu diisi (Harvard, 2014). Tahapan pada penelitian ini mengacu pada pengolahan dan analisa data berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dan PMK Nomor 17 Tahun 2019. Untuk mengisi kesenjangan yang ada, peningkatan rancangan PIPK pada penelitian ini berpedoman pada PMK Nomor 17 Tahun 2019. Gambar 1 menunjukkan kerangka penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini

3. Data dan Metode

Data dan informasi pada penelitian ini dikumpulkan dengan perolehan data primer melalui wawancara semi terstruktur, serta data sekunder berupa instrumen dokumentasi yang diperoleh dari sumber eksternal dan internal KPK. Wawancara

pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur terhadap 7 responden melalui tatap muka ataupun daring dengan rata-rata durasi selama 1 hingga 2 jam. Pertanyaan wawancara dikembangkan berdasarkan PMK Pedoman PIPK dan panduan desain ICoFR untuk level transaksi. Responden penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.

Sedangkan instrumen dokumentasi yang digunakan antara lain: (1) Laporan Keuangan KPK dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPK; (2) Prosedur Operasional Baku (POB) terkait proses pengelolaan barang rampasan KPK; (3) Pedoman pelaksanaan PIPK, baik bersumber dari internal KPK maupun lembaga pemerintah lainnya; (4) Surat Tugas Tim Penilai PIPK dan Surat Tugas Tim Reviu PIPK; (5) Matriks Risiko-Pengendalian PIPK (*Risk Control Matrix*) dan kertas kerja penilaian PIPK; serta (6) Laporan hasil penilaian PIPK dan laporan hasil reviu PIPK.

Tabel 1. Responden Wawancara

Kode	Jabatan	Dasar Pemilihan	Pengalaman	Durasi Wawancara
A	Praktisi GRC	Memperoleh <i>benchmark</i> untuk <i>best practices</i> ICoFR di sektor swasta	> 17 tahun	2 jam
B	Direktur Labuksi	Memperoleh pemahaman atas proses pengelolaan barang rampasan KPK beserta pelaporan keuangannya, serta harapan perbaikan PIPK	1,5 tahun	1,5 jam
C	Kasatgas Tata Kelola Direktorat Labuksi	Memperoleh pemahaman atas penerapan PIPK dalam proses pengelolaan barang rampasan KPK	3 tahun	1,5 jam
D	Operator SAKTI di Satgas Tata Kelola	Memperoleh pemahaman terkait pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK	3 tahun	1 jam
E	Tim Penilai PIPK / Analis Pengelola Keuangan	Memperoleh pemahaman atas pelaporan keuangan dan penilaian PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, serta kendala selama ini	3,5 tahun	1,5 jam
F	Tim Reviu PIPK di Inspektorat	Memperoleh pemahaman terkait reviu PIPK atas proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini, serta kendala selama ini	5 tahun	1 jam
G	PIC PIPK dari Kemenkeu	Memperoleh pemahaman interpretasi PMK Pedoman PIPK dan harapan terkait penerapan PIPK untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK	6 tahun	2 jam

Seluruh data dan informasi pada penelitian ini selanjutnya dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis konten dan uji validitas data. Analisis deskriptif kualitatif yang merupakan pendekatan untuk mengorganisir, mengklasifikasi, dan menyajikan data kualitatif secara naratif atau tematis tanpa melakukan interpretasi yang mendalam (Saldana, 2021), digunakan untuk menganalisa instrumen dokumentasi. Sedangkan untuk hasil wawancara, dilakukan analisis konten menggunakan software NVIVO12 Plus, sehingga dapat mengidentifikasi pola dalam komunikasi

yang terekam. Kemudian, dilakukan uji validitas data untuk memastikan bahwa data yang dikum-

pulkan dapat mewakili fenomena yang sedang diteliti dan kesimpulan atau temuan yang dihasilkan dari data tersebut dapat dianggap akurat dan dapat dipercaya.

Uji validitas data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi menggunakan beberapa metode dalam penelitian kualitatif untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu fenomena, sehingga dapat menguji validitas melalui konvergensi informasi dari ber-

bagai sumber (Carter *et al.*, 2014). Triangulasi sumber data mengacu pada kombinasi sumber data yang berbeda yang diperiksa pada waktu, tempat, dan orang yang berbeda, untuk menemukan kesamaan yang kredibel (Denzin & Lincoln, 2017; Obar, 2021). Sedangkan triangulasi metode mengacu pada penggunaan beberapa pendekatan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif untuk memperkuat keabsahan data (Creswell & Poth, 2017). Triangulasi metode pada penelitian ini menggunakan PMK Nomor 17 Tahun 2019, teori perancangan PIPK tingkat proses/transaksi Ikatan Akuntan Indonesia (2015), hasil analisis dokumen dan hasil analisis triangulasi sumber data.

4. Hasil

Hasil analisis deskriptif kualitatif penelitian atas instrumen dokumen yang diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2. Analisis konten atas hasil wawancara 7 responden menggunakan *fitur word frequency* pada aplikasi NVIVO 12 Plus memberikan kesimpulan yaitu responden penelitian memahami bahwa penelitian ini terkait dengan akun untuk barang dengan status dirampas

untuk negara, dan memahami bahwa fokus penelitian berpusat pada PIPK sehingga hanya terkait dengan pengendalian untuk pencatatan keuangan yang dapat memitigasi terjadinya risiko keuangan.

Untuk mengenali proses pelaporan keuangan dan rancangan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini (*As-Is*), dilakukan triangulasi sumber data atas tiga responden yang selanjutnya dilakukan triangulasi metode dengan instrumen dokumentasi terkait. Lampiran 1 menunjukkan hasil triangulasi metode untuk proses pelaporan keuangan dan rancangan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini (*As-Is*). Hasil triangulasi sumber data atas transkrip wawancara kepada 7 responden untuk memperoleh harapan peningkatan rancangan PIPK pada pengelolaan barang rampasan KPK (*To-Be*) ditunjukkan pada Lampiran 2. Sedangkan Lampiran 3 menunjukkan hasil triangulasi sumber data atas 2 responden yang selanjutnya dilakukan triangulasi metode dengan instrumen dokumentasi berupa PMK Nomor 17 Tahun 2019 untuk memperoleh *benchmark* peningkatan rancangan PIPK pada pengelolaan barang rampasan KPK (*To-Be*).

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif

No.	Instrumen Dokumen yang Dianalisis	Hasil
1.	LHP SPI BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2015 s.d 2021	Terdapat 17 temuan SPI dari BPK atas akun persediaan barang rampasan KPK sejak tahun 2015 s.d 2021
2.	POB KPK terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Tahun 2020	Belum ada pedoman formil ataupun <i>flowchart</i> terkait dengan pelaporan keuangan atas barang rampasan KPK
3.	Pedoman pelaksanaan PIPK di KPK	Belum ada pedoman formil dari Pimpinan KPK terkait pelaksanaan PIPK di lingkungan KPK
4.	Surat Tugas Tim Penilai PIPK dan Tim Reviu PIPK	Pihak pelaksana penilaian PIPK berasal dari Biro Keuangan dan Biro Umum KPK, sedangkan pihak pelaksana reviu PIPK berasal dari Inspektorat KPK
5.	Matriks Risiko-Pengendalian PIPK dan kertas kerja penilaian PIPK	Rancangan PIPK untuk akun persediaan barang rampasan KPK masih belum sesuai dengan konsep ideal

5. Pembahasan

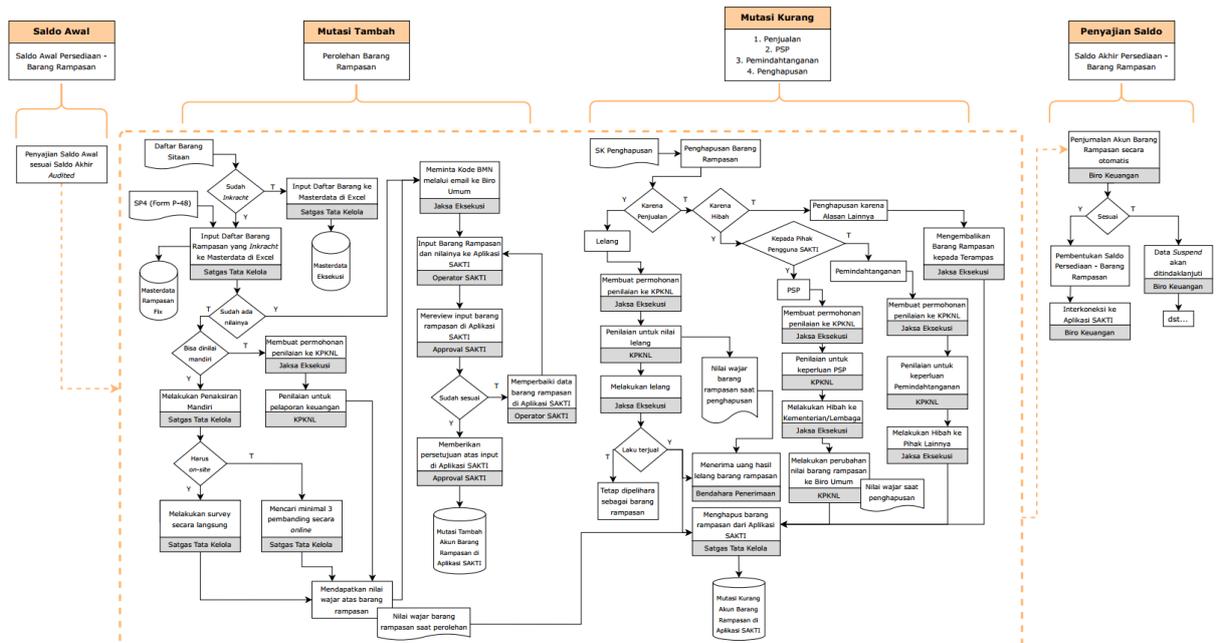
Untuk menganalisa proses pelaporan keuangan dan rancangan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini (*As-Is*), dilakukan dengan beberapa tahapan analisa yaitu: (1) memahami pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK dari pemilik proses bisnis, (2) mendokumentasikan data dan informasi atas pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK ke dalam *flowchart*, serta (3) melakukan identifikasi risiko pelaporan keuangan untuk setiap tahapan pengelolaan barang rampasan KPK.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pemahaman yang diperoleh terkait prosedur pelaporan keuangan atas akun barang rampasan KPK saat ini antara lain: (1) Perolehan barang rampasan KPK dicatat pada Masterdata secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel*; (2) Barang rampasan KPK dapat dinilai dengan menggunakan metode Penafsiran Mandiri atau Penilaian oleh KPKNL dengan tujuan pelaporan keuangan; (3) Barang rampasan KPK yang telah memiliki nilai wajar dicatat pada Aplikasi SAKTI; (4) Barang rampasan KPK yang akan dilelang atau dihibahkan, dinilai dengan menggunakan Penilaian oleh KPKNL; serta (5) Barang rampasan KPK yang dilakukan Penjualan, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Pemin-

dahtanganan, ataupun Penghapusan untuk alasan lainnya dilakukan Penghapusan pada Aplikasi SAKTI.

Saat ini pemilik proses bisnis barang rampasan KPK belum memiliki *flowchart* untuk pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, sehingga perlu dilakukan penyusunan *flowchart* untuk proses bisnis tersebut. *Flowchart* pelaporan keuangan pada proses pengelolaan

barang rampasan KPK sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 disusun pada penelitian ini berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik proses bisnis dengan dipedomani Kebijakan Akuntansi KPK dan Prosedur Operasional Baku (POB) terkait Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti. *Flowchart* ini telah mendapatkan konfirmasi dari pemilik proses bisnis.



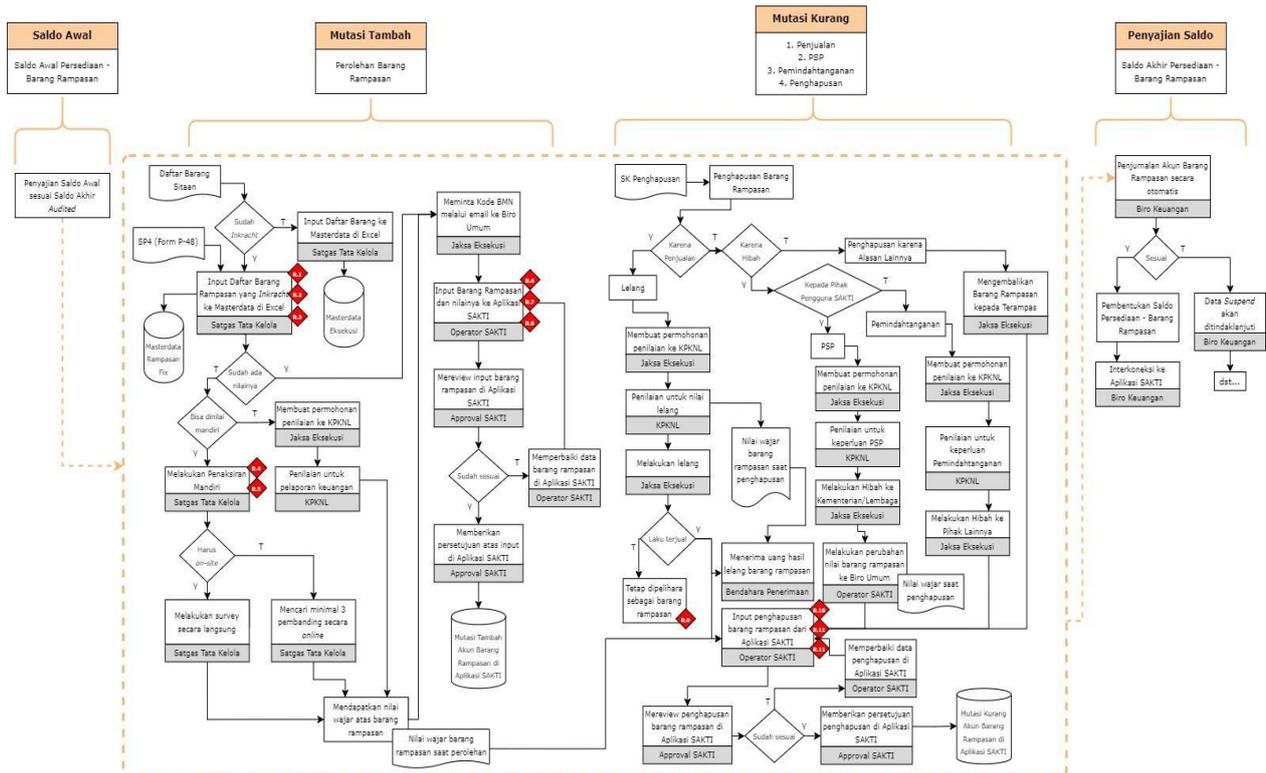
Gambar 2. *Flowchart* Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK

Kemudian dilakukan identifikasi risiko, dimana penilaian risiko yang tidak tepat dapat membahayakan efektivitas dari PIPK itu sendiri (Asare et al., 2013). Identifikasi risiko pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK pada penelitian ini dilakukan dengan cara: (1) membuat daftar risiko pelaporan keuangan yang mempengaruhi setiap tahapan proses pengelolaan barang rampasan KPK, dan (2) informasi responden terkait hambatan dalam kegiatan pelaporan keuangan yang dialami selama ini. Daftar risiko pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK yang disusun pada penelitian ini antara lain: (1) Barang rampasan tidak memiliki nilai sampai dengan akhir periode pelaporan; (2) Harga satuan barang rampasan tidak dapat diidentifikasi; (3) Pencatatan nilai barang rampasan tertukar; (4) Jumlah barang rampasan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang; (5) Masterdata barang rampasan tidak mutakhir; (6) Barang rampasan yang telah dilelang / dihibahkan

tidak dihapus dari persediaan; (7) Perolehan barang rampasan tidak tercatat pada laporan keuangan; (8) Barang rampasan tercatat dua kali/ganda; (9) Tidak ada dokumen pendukung pada penghapusan barang rampasan; (10) Barang rampasan yang tidak laku lelang dihapus dari persediaan; (11) Masterdata barang rampasan termodifikasi; serta (12) Hasil penaksiran mandiri atas barang rampasan tidak wajar. Adapun pembuatan daftar risiko pelaporan keuangan untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK tersebut dilakukan dengan melakukan konversi Temuan BPK atas Laporan Keuangan KPK terkait proses pengelolaan barang rampasan KPK.

Selanjutnya dilakukan identifikasi risiko utama dan menempatkannya pada *flowchart* proses bisnis yang sebelumnya telah disusun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Sehingga dapat diketahui proses/transaksi utama pada proses pengelolaan barang rampasan KPK yang memiliki risiko pelaporan keuangan sebagaimana ditunjukkan tabel 3.

Peningkatan Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK
Firdha Maghfira dan Ludovicus Sensi Wondabio



Gambar 3. Flowchart Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK yang Dilengkapi Risiko

Tabel 3. Risiko Utama Pelaporan Keuangan pada Barang Rampasan KPK

Proses/Transaksi Utama	No	Risiko Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan Berdasarkan Temuan BPK 2015 – 2021
Input daftar barang rampasan yang <i>Inkracht</i> ke Masterdata di Excel	R.1	Harga satuan barang rampasan tidak dapat diidentifikasi
	R.2	Masterdata barang rampasan tidak mutakhir
	R.3	Masterdata barang rampasan termodifikasi
Melakukan penaksiran mandiri	R.4	Barang rampasan tidak memiliki nilai sampai dengan akhir periode pelaporan
	R.5	Hasil penaksiran mandiri atas barang rampasan tidak wajar
Input barang rampasan dan nilainya ke Aplikasi SAKTI	R.6	Pencatatan nilai barang rampasan tertukar
	R.7	Perolehan barang rampasan tidak tercatat pada laporan keuangan
Pemeliharaan barang rampasan	R.8	Barang rampasan tercatat dua kali / ganda
	R.9	Jumlah barang rampasan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang
Menghapus barang rampasan dari Aplikasi SAKTI	R.10	Barang rampasan yang telah dilelang / dihibahkan tidak dihapus dari persediaan
	R.11	Barang rampasan yang tidak laku lelang dihapus dari persediaan
	R.12	Tidak ada dokumen pendukung pada penghapusan barang rampasan

Setelah menganalisis pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini, selanjutnya dilakukan analisa harapan pelaksanaan PIPK pada tingkat proses bisnis. Harapan pelaksanaan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK yang diperoleh pada penelitian ini ditunjukkan pada Pimpinan KPK, Penerap PIPK, Tim Penilai PIPK, Satgas PBB, dan Satgas Tata Kelola. Penegakan oleh manajemen diperlukan agar sistem pengendalian internal menjadi efektif (Wahdan & Al-Shaarawy, 2018; Diala & Houmes, 2019; Ge *et al.*, 2021; dan Kalyani & Murugan, 2021). Terlebih pelaksanaan PIPK yang

yang berkualitas dapat mencapai tujuan yang positif terutama jika seluruh pihak yang terlibat mematuhi tugasnya (Agbenyo *et al.*, 2018). Harapan kepada Pimpinan KPK antara lain: (1) Membuat kebijakan, prosedur dan instruksi kerja untuk melaksanakan PIPK; (2) Menyelenggarakan sosialisasi dan pe-latihan pelaksanaan PIPK kepada tiga lini PIPK; (3) Melakukan perbaikan pembagian kewenangan tiga lini PIPK di KPK; (4) Membuat POB atau SOP terkait pengendalian yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko utama pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK; (5) Memastikan penggunaan Aplikasi SINERGI terkait pengelolaan barang rampasan

Tabel 4. Rancangan Matriks Risiko-Pengendalian pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK

No	Proses/ Transaksi	Risiko Utama	Diisi oleh Pengendali					Diisi Oleh Penilai	
			Nama Pengendali Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendali	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendali	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
1	Input perolehan barang rampasan	Harga satuan barang rampasan tidak dapat diidentifikasi	Pencatatan terpisah dengan harga unit berbeda	Aplikasi SINERGI	Operator dan Apprval SINERGI	Materdata barang sitaan dari Satgas PBB	Manual	<i>Completeness</i>	
		Materdata barang rampasan tidak mutakhir	Pencatatan menggunakan aplikasi			-SP4 (Form P-48)	ITDM	<i>Existence, Completeness</i>	
		Materdata barang rampasan termodifikasi				-Berita acara rekonsiliasi Internal Unit Kerja Labuksi Biro Umum		<i>Existence, Completeness</i>	
2	Pelaksanaan penaksiran mandiri	Barang rampasan tidak memiliki nilai sampai dengan akhir periode pelaporan	Penjadwalan penaksiran mandiri	Aplikasi SAKTI	Satgas tata Kelola dan Biro Keuangan	-Rekap penaksiran mandiri	Manual	<i>Completeness Valuation</i>	
		Hasil penaksiran mandiri atas barang rampasan tidak wajar	<i>Survey on-site</i>			- Laporan pelaksanaan mandiri	Manual	<i>Valuation</i>	
3	Input barang rampasan dan nilai ke Aplikasi SAKTI	Pencatatan nilai barang rampasan tertukar	Rekonsiliasi setiap bulan	Aplikasi SAKTI	Operator dan Approval SAKTI	-Kertas kerja berupa rekap barang rampasan	ITDM, Manual	<i>Existence, Completeness, Valuation</i>	
		Perolehan barang rampasan tidak tercatat pada laporan keuangan				-SP4 (Form P-48)		<i>Existence, Completeness, Valuation</i>	
4	Penghapusan barang rampasan dari aplikasi	Barang rampasan yang telah dilelang/ dihibahkan tidak				-BA pelaksana PSP/Hibah	ITDM, Manual	<i>Existence, Completeness, Valuation</i>	
						-Risalah lelang BAST barang			

Peningkatan Rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK
Firdha Maghfira dan Ludovicus Sensi Wondabio

No	Proses/ Transaksi	Risiko Utama	Diisi oleh Pengendali					Asersi	Diisi Oleh Penilai Memadai Ya/ Tidak
			Nama Pengendali Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendali	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendali		
	SAKTI	dihapus dari persediaan Barang rampasan yang yang tidak laku lelang dihapus dari persediaan				rampasan kepada pihak yang menerima		<i>Existence, Completeness, Valuation</i>	
5	Pemeliharaan barang rampasan	Jumlah barang rampasan yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang	Stock opname setiap 8 bulan	Aplikasi SINERGI dan Buku Gudang	Satgas Tata Kelola dan Petugas Gudang	-Kertas kerja berupa rekap barang rampasaan -Buku Gudang	Manual	<i>Existence, Completeness, Accuracy</i>	

Tabel 5. Rancangan Pelaksanaan PIPK untuk Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK

Dukungan yang Diperlukan	Rincian
Pembuatan pedoman formil terkait dengan pelaksanaan PIPK di KPK	Keputusan Pimpinan atau Surat Edaran terkait dengan arahan Penerapan dan Penilaian PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK POB, SOP ataupun Instruksi Kerja untuk melaksanakan pengendalian yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko utama pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan KPK yang belum diatur sebelumnya Surat Edaran untuk menggalakkan kembali penggunaan Aplikasi SINERGI
Peningkatan kemampuan dan kapabilitas pelaksana PIPK	Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan terkait pelaksanaan PIPK untuk seluruh tiga lini PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK Mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas pembagian kewenangan tiga lini PIPK di KPK Mempertimbangkan penambahan personil pada pemilik proses bisnis, khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara efektif

KPK dilakukan sejak barang masih berstatus sebagai barang sitaan; serta (6) Menambah personal pada pemilik pengendalian akun barang rampasan KPK dengan latar belakang akuntansi. Harapan kepada Penerap PIPK antara lain: (1) Melaksanakan *walkthrough* atas pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan; (2) Membuat *flowchart* pelaporan keuangan pada pengelolaan barang rampasan; (3) Memastikan kelengkapan asersi manajemen atas risiko pelaporan keuangan yang teridentifikasi; serta (4) Menyusun Matriks Risiko-Pengendalian dengan lebih ideal. Harapan kepada Tim Penilai PIPK diantaranya: (1) Seluruh anggota Tim Penilai terlibat dalam pelaksanaan Penilaian PIPK dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya; serta (2) Melakukan pemilihan narasumber dan dokumen pendukung yang lebih baik pada saat melakukan penilaian PIPK. Harapan kepada Satgas PBB yaitu memisahkan rincian barang masih berstatus sitaan dengan lebih detail dan terpisah. Harapan kepada Satgas Tata Kelola diantaranya: (1) Melaksanakan PIPK untuk akun barang rampasan KPK sebaik-baiknya; dan (2) Mengoptimalkan Penaksiran Mandiri pada saat anggaran tersedia.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem pengendalian internal dengan menerapkan *Control Self Assessment* (CSA) dalam ke-rangka PIPK (Suharto *et al.*, 2018). Terlebih, laporan manajemen atas PIPK dapat meningkatkan kualitas pelaporan (Dowdell *et al.*, 2014). Oleh karena itu, untuk memenuhi kesenjangan antara PIPK *As-Is* dengan PIPK *To-Be* pada akun barang rampasan KPK, dilakukan penyusunan 2 (dua) rancangan yang diusulkan yaitu: (1) rancangan Matriks Risiko-Pengendalian sebagai desain PIPK, dan (2) rancangan pelaksanaan PIPK untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK. Rancangan Matriks Risiko-Pengendalian untuk akun barang rampasan KPK ditampilkan Gambar 4. Selanjutnya, untuk mendorong efektivitas penerapan, penilaian maupun reu PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, diperlukan dukungan dan komitmen dari Pimpinan KPK sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Untuk mencapai PIPK yang efektif, KPK perlu melakukan peningkatan rancangan PIPK untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK saat ini, serta menyusun pedoman formil dan mendorong pengembangan dan perbaikan pe-

laksanaan PIPK untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rancangan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK berdasarkan konsep teori dan praktik ICoFR, serta secara khusus mengacu pada PMK Pedoman PIPK untuk mencapai PIPK yang efektif disimpulkan: (1) Terkait peningkatan rancangan Matriks Risiko-Pengendalian untuk desain PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, diperlukan perubahan pada Matriks Risiko-Pengendalian KPK. Rancangan Matriks Risiko-Pengendalian KPK yang disusun pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4 yang telah dijelaskan sebelumnya, serta (2) Terkait peningkatan pelaksanaan PIPK untuk proses pengelolaan barang rampasan KPK, diperlukan dukungan dan komitmen dari Pimpinan KPK untuk membuat pedoman formil terkait pelaksanaan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, dan memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas pelaksana PIPK untuk akun barang rampasan KPK. Di sisi lain, diperlukan pula komitmen yang kuat dari tiga lini PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK sehingga PIPK semakin efektif.

Saran

Untuk mewujudkan peningkatan rancangan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK, saran yang diusulkan antara lain: (1) Untuk jangka pendek, ketiga lini PIPK di KPK melakukan FGD, *walkthrough*, perbaikan *flowchart*, mereviu kembali risiko utama, serta memperbaiki Matriks Risiko-Pengendalian untuk akun barang rampasan KPK yang disusun pada penelitian ini. Selain itu, pimpinan KPK melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan atas pembagian kewenangan tiga lini PIPK di KPK; (2) Untuk jangka menengah, Pimpinan KPK menerbitkan Keputusan Pimpinan terkait arahan Penerapan dan Penilaian PIPK, mendorong sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi PIPK untuk seluruh tiga lini PIPK, menggalakkan penggunaan Aplikasi SINERGI, menerbitkan SOP atau Instruksi Kerja untuk mengkomodir pengendalian intern yang dibutuhkan, serta menambah personal pemilik pengendalian dengan latar belakang pendidikan sesuai. Kepada ketiga lini PIPK di KPK disarankan untuk melaksanakan Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK sebaik-baiknya dan memanfaatkan Aplikasi SINERGI untuk mencatat barang rampasan KPK. Kepada Kementerian Keuangan disarankan untuk melakukan reu dan memberikan *feedback* atas Laporan Penilaian dan Reviu PIPK entitas pe-

merintah, serta (3) Untuk jangka panjang, ketiga lini PIPK pada akun barang rampasan KPK mengevaluasi secara berkelanjutan terhadap desain maupun implementasi PIPK untuk akun barang rampasan KPK dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Keterbatasan penelitian ini diantaranya: (1) Hanya mencakup peningkatan rancangan PIPK untuk dua komponen COSO *Internal Control* atau SPIP yaitu Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian; (2) Peningkatan rancangan PIPK tidak sampai peningkatan peran dari masing-masing Lini PIPK untuk akun barang rampasan KPK; serta (3) Risiko utama pelaporan keuangan pada akun barang rampasan KPK diidentifikasi dengan melakukan konversi temuan BPK atas akun barang rampasan KPK sebelumnya, dan hanya sampai dengan Temuan BPK untuk Laporan Keuangan KPK Tahun 2021. Sehingga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat meneliti lebih lanjut terkait: (1) Efektivitas peran dari masing-masing Penerap, Tim Penilai dan Tim Reviu PIPK untuk tingkat proses bisnis; (2) Evaluasi desain maupun implementasi PIPK untuk tingkat proses bisnis pada PIPK yang telah berjalan dengan optimal; (3) Evaluasi PIPK untuk tingkat entitas pada entitas pemerintah yang berpedoman pada PMK Nomor 17 Tahun 2019; serta (4) Perancangan optimalisasi desain dan implementasi ICoFR pada sektor swasta dengan mengacu pada kerangka COSO ICoFR.

Daftar Pustaka

- Adrianto, E., & Wahyuni, T. (2019). Evaluation of Internal Control Over Financial Reporting on Inventory Management: A Case Study on Inventory Management at National Human Right Commission. *Proceedings of the 3rd Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH)* 2018). <https://doi.org/10.2991/aprish-18.2019.18>
- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811-818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Agbenyo, W., Jiang, Y., & Cobblah, P. K. (2018). Assessment of Government Internal Control Systems on Financial Reporting Quality in Ghana: A Case Study of Ghana Revenue Authority. *International Journal of Economics and Finance*, 10(11), 40. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n11p40>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesiivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125>
- Asare, S. K., Fitzgerald, B. C., Graham, L. E., Joe, J. R., Negangard, E. M., & Wolfe, C. J. (2013). Auditors' Internal Control over Financial Reporting Decisions: Analysis, Synthesis, and Research Directions. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 32(Supplement 1), 131-166. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50345>
- Asyari, M. H., Khoirunisa, I., Sunaryo, K., & Susilo, T. P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Media Riset Akuntansi*, 11(1), 93-116.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 Nomor: 25A/HP/XIV/05/2019*.
- Bimo, I. D., Siregar, S. V., Hermawan, A. A., & Wardhani, R. (2019). Internal Control Over Financial Reporting, Organizational Complexity, and Financial Reporting Quality. *International Journal of Economics and Management*, 13(2), 331-342.
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545-547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diala, L. U., & Houmes, R. (2019). The impact of high insider ownership on SOX 404 internal controls. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(1), 106-122. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2019-0087>

- Dowdell, T. D., Herda, D. N., & Notbohm, M. A. (2014). Do management reports on internal control over financial reporting improve financial reporting? *Research in Accounting Regulation*, 26(1), 104-109. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2014.02.011>
- Farradhi, M., & Hartanti, D. (2023). Efektivitas Internal Control over Financial Reporting (ICFR) pada project konstruksi perusahaan BUMN karya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(7), 3081-3094.
- Fitriana, N., & Hoesada, J. (2019). The Effect of Asset Management, Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), and Organizational Commitment on Quality of Financial Reporting (Survey at Ministry of Marine Affairs of Fisheries Republic Indonesia). *Scholars Bulletin*, 05(10), 542-550. <https://doi.org/10.36348/sb.2019.v05i10.001>
- Ge, W., Li, Z., Liu, Q., & McVay, S. (2021). Internal Control over Financial Reporting and Resource Extraction: Evidence from China*. *Contemporary Accounting Research*, 38(2), 1274-1309. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12653>
- Hanif, F. N., & Sunitiyoso, Y. (2021). Analysis of The Occurrence of repeated BPK Audit Findings in The Financial Statements of a Government Institution. *Journal of International Conference Proceedings*, 4(2). <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1236>
- Harvard. (2014). *Gap Analysis*. Harvard School of Public Health.
- Hidayah, N. (2019). The Effects of Internal Control Implementation and Organizational Culture on Financial Reporting Quality. Study on Local Government of Jakarta, Indonesia. *Religación*, 4(16), 236-244.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Chartered Accountant: Sistem Informasi dan Pengendalian Internal*. IAI.
- Indriasih, D. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20), 38-47.
- Kalyani, V., & Murugan, K. R. (2021). Implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICFR) Framework and CSR Activity - A Case Study of Public Company in India. *Shodh Sanchar Bulletin*, 11(1), 111-117.
- Kasim, E. Y. (2015). Effect of Government Accountants Competency and Implementation of Internal Control to The Quality of Government Financial Reporting. *International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 97-105.
- Muhamad, A., & Wahyuni, T. (2018). Evaluation of Internal Control over Financial Reporting Designed on Tax Receivable Management: A Case Study on Tax Receivable Management Cycle at the Directorate General of Taxes. *Proceedings of the 6th International Accounting Conference (IAC 2017)*. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.38>
- Obar, J. A. (2021). *Source Triangulation Skills and the Future of Digital Inclusion: How Information Literacy Policy Can Address Misinformation and Disinformation Challenges - Yale Law School*. Yale Law School.
- Oh, K., Choi, W., Jeong, S. W., & Pae, J. (2014). The effect of different levels of internal control over financial reporting regulation on the quality of accounting information: evidence from Korea. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 21(4), 412-442. <https://doi.org/10.1080/16081625.2014.880203>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- Saldana, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Suharto, D., Maarif, M. S., & Kirbrandoko, D. P. (2018). Selection Internal Control over Financial Reporting Framework in the Republic of Indonesia using Analytic Hierarchy Process Approach. *Asian Journal of Applied Sciences*, 6(5). <https://doi.org/10.24203/ajas.v6i5.5504>
- Sunday Ajao, O., & Olayemi Oluwadamilola, A. (2020). Internal Control Systems and Quality of Financial Reporting in Insurance Industry in Nigeria. *Journal of Finance and Accounting*, 8(5), 218. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20200805.12>
- Wahdan, M. A., & Al-Shaarawy, H. A. (2018). Automatic Formulation of the Internal Control Report over Financial Reporting. *Science Journal for Commercial Research*, 4, 9-44.
- Yasmin, Y., Winarningsih, S., & Mulyanti, S. (2021). The Effect of the Internal Control System Effectiveness and the Quality of Financial

Reporting and Its Impact on Fraud Prevention
of Bandung Regency. *Jurnal Manajemen
Pelayanan Publik*, 5(1), 13.
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v5i1.25785>

Lampiran 1. Hasil Triangulasi Metode untuk Rancangan PIPK pada Proses Pengelolaan Barang Rampasan KPK Saat Ini (*As-Is*)

Pokok Pertanyaan	Wawancara	Instrumen Dokumentasi
Prosedur pelaporan keuangan akun barang rampasan KPK saat ini	<p>Daftar barang rampasan KPK dicatat pada <i>excel database</i> master data eksekusi pertahun</p> <p>Dilakukan penilaian dengan nilai wajar dengan penafsiran mandiri (<i>on-desk</i> atau survey langsung), atau penilaian KPKNL untuk tujuan pelaporan keuangan</p> <p>Dicatat ke dalam Aplikasi SAKTI</p> <p>Ketika akan dihibahkan atau dilelang, dilakukan penilaian dari KPKNL</p>	<p>Terkait dengan pencatatan barang rampasan KPK, KPK telah memiliki Aplikasi SINERGI yang telah disosialisasikan sejak tanggal 19 Januari 2021</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2021, penilaian barang rampasan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik</p> <p>Berdasarkan LHP SPI BPK atas Laporan Keuangan KPK Tahun 2019, untuk kepentingan pelaporan, KPK dapat menggunakan nilai taksiran yang dikeluarkan oleh tim penaksir yang dibentuk/ditetapkan berdasarkan SK Sekjen KPK.</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 171 Tahun 2021, pencatatan barang rampasan KPK sebagai Akun Persediaan barang milik negara dicatat menggunakan Aplikasi SAKTI</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 145 Tahun 2021, penilaian barang rampasan untuk tujuan Penjualan, Penggunaan, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik</p>
Desain PIPK untuk akun barang rampasan KPK saat ini	Pembuatan desain PIPK disusun oleh Biro Keuangan	Berdasarkan PMK Nomor 17 Tahun 2019, perancangan desain PIPK dilakukan oleh Penerap PIPK, dalam hal barang rampasan KPK yaitu Direktorat Labuksi, dengan perbaikan oleh Tim Penilai PIPK.
Implementasi PIPK untuk akun barang rampasan KPK saat ini	Pengendalian pada Penerap PIPK masih mengacu pada pengendalian preventif sebagaimana diatur pada SOP / pedoman yang berlaku. Belum ada pedoman formil dari pimpinan KPK yang mengatur implementasi PIPK di lingkungan KPK	Penerapan PIPK pada tingkat proses/ transaksi dilakukan dengan mengacu pada desain PIPK berupa matriks risiko-pengendalian. Berdasarkan dokumentasi dari beberapa instansi pemerintah lainnya, terdapat pedoman formil dari pimpinan lembaga yang mengatur implementasi PIPK di lingkungan entitas tersebut

Lampiran 2. Hasil Triangulasi Sumber Data untuk Harapan Peningkatan Rancangan PIPK pada Pengelolaan Barang Rampasan KPK (*To-Be*)

Sumber	Resp	Harapan terkait PIPK pada pada Pengelolaan Barang Rampasan KPK
Eksternal	A	Adanya dukungan dari Pimpinan KPK, seperti dengan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi implementasi PIPK 2. Pembuatan KPI atas implementasi PIPK 3. Pembuatan kebijakan, prosedur serta instruksi kerja pelaksanaan PIPK 4. <i>Awareness</i> program yang berkelanjutan terkait PIPK 5. Penambahan <i>competency matrix</i>, <i>learning curriculum</i> dan program pelatihan bagi pemilik proses bisnis terkait pelaksanaan implementasi PIPK
	G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kewenangan tiga lini atas PIPK di KPK sebaiknya biro keuangan termasuk pada lini pertama, dan lini kedua merupakan tim <i>ad hoc</i> yang tidak bersentuhan dengan pelaporan keuangan 2. Pembuatan <i>flowchart</i> untuk mendokumentasikan proses bisnis 3. Pembuatan pedoman untuk pengendalian risiko utama 4. Memastikan apakah asersi manajemen telah lengkap 5. Menyusun Matriks Risiko-Pengendalian dengan lebih ideal.
Direktorat Labuksi (<i>Control Owner</i>)	B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan dasar hukum terkait PIPK, diantaranya memuat pihak yang terlibat dan tugas yang dilakukan mulai dari penerapan, penilaian dan reuiu 2. Dilakukan sosialisasi terkait PIPK sehingga mengetahui peran serta masing-masing pihak
	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi jaksa eksekusi terkait tahapan barang rampasan selalu <i>update</i> 2. Ketersediaan anggaran untuk penaksiran mandiri di akhir tahun 3. Penambahan personil Satgas Tata Kelola dengan latar belakang akuntansi 4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SINERGI

Sumber	Resp	Harapan terkait PIPK pada pada Pengelolaan Barang Rampasan KPK
Biro Keuangan	D	5. Satgas Tata Kelola dapat fokus menjalankan peran pelaporan keuangan barang rampasan 6. Memperoleh <i>benchmark</i> dari luar negeri terkait pelaporan keuangan barang rampasan 7. Adanya solusi perbedaan nilai atas barang rampasan yang dilakukan PSP 1. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SINERGI\ 2. Deskripsi dari saat barang masih barang sitaan dijelaskan secara detail dan terpisah untuk memudahkan penghapusan barang rampasan setelah laku terjual pada saat dilelang
	E	1. Pembuatan Juknis tersendiri sebagai pedoman tertulis atas pelaporan keuangan barang rampasan 2. Pembuatan pedoman penerapan PIPK 3. Pelatihan terkait PIPK untuk seluruh tiga lini yang terlibat dalam PIPK 4. Pelaksanaan PIPK baik pada tahap penerapan, penilaian dan reviu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak 5. Solusi atas terbenturnya waktu penilaian PIPK dengan adanya pemeriksaan lainnya (BPK)
Inspektorat	F	1. Pembuatan SOP pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko utama yang teridentifikasi, sehingga pengendalian tersebut dapat dimasukkan ke dalam Matriks Risiko-Pengendalian 2. Pelaksanaan <i>Walkthrough</i> atas pelaporan keuangan pada proses pengelolaan barang rampasan 3. Pelaksanaan penilaian PIPK lebih baik lagi dalam memilih narasumber dan dokumen pendukung

Lampiran 3. Hasil Triangulasi Metode untuk *Benchmark* Peningkatan Rancangan PIPK pada Pengelolaan Barang Rampasan KPK (*To-Be*)

Pokok Pertanyaan	Wawancara	Instrumen Dokumentasi
Yang perlu diperhatikan untuk memahami proses bisnis signifikan serta pelaporan keuangannya	1. Pelajari Laporan Keuangan KPK 2. Pelajari SOP yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengelolaan barang rampasan KPK 3. Lakukan <i>walkthrough</i> atas setiap proses utama yang teridentifikasi 4. Mempertimbangkan Temuan BPK terkait dengan pengelolaan barang rampasan KPK 5. Lakukan FGD antara tiga lini PIPK di KPK	1. Identifikasi akun signifikan terlebih dahulu 2. Perhatikan tingkat ketergantungannya dengan teknologi informasi dan komunikasi
Yang perlu diperhatikan untuk mendokumentasikan data dan informasi pada proses bisnis ke dalam <i>flowchart</i>	1. Tampilkan alur pelaporan keuangan barang rampasan KPK sejak akun terbentuk hingga tersaji pada laporan keuangan 2. Tampilkan <i>highlight</i> proses/transaksi utama 3. Pahami titik Temuan BPK dan tampilkan risiko kunci 4. Libatkan Direktorat Labuksi dan Biro Keuangan selaku pemilik proses bisnis dalam penyusunan <i>flowchart</i>	Lakukan peninjauan <i>walkthrough</i> untuk memastikan bahwa proses signifikan yang didokumentasikan masih sesuai dan mutakhir
Yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi risiko pelaporan keuangan	1. Libatkan pemilik proses bisnis 2. Manfaatkan Temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya, terutama Temuan yang berulang 3. Konversi Temuan BPK menjadi bahasa risiko 4. Identifikasi tahapan pelaporan keuangan yang memiliki risiko utama tersebut 5. Prediksi risiko pelaporan keuangan yang mungkin terjadi melalui FGD jika memungkinkan	Pertimbangkan asersi laporan keuangan atas akun signifikan
Yang perlu diperhatikan pada saat menyusun Matriks Risiko-Pengendalian	1. Libatkan pemilik proses bisnis 2. Prioritas memasukkan risiko utama yang berada di atas selera risiko entitas 3. Siapkan kertas kerja pendukung desain Matriks Risiko-Pengendalian seperti <i>flowchart</i> 4. Pastikan pengendalian pada Matriks sudah didasarkan pada SOP ataupun pedoman lainnya yang berlaku 5. Pastikan kelengkapan asersi manajemen dari masing-masing pengendalian pada Matriks	Kolom (1) s.d. (9) diisi oleh Pemilik Pengendalian sedangkan Kolom (10), *, dan ** diisi Tim Penilai